

Aspirasi Politik Dan Pembangunan Kekuatan Angkatan Laut

Oleh: Umar Abubakar

1. Pendahuluan

Banyak cara berpikir yang dapat ditempuh dalam proses membangun suatu kekuatan militer. Salah satunya adalah dengan melihat kekuatan militer sebagai cerminan aspirasi politik dari suatu negara. Aspirasi politik negara yang menentukan postur dari kekuatan militernya. Salah satu definisi mengatakan postur militer adalah *capability in terms of personnel and material that affect the capacity to fight a war*.¹

Adapun kemampuan jenis perang seperti apa yang dimaksudkan dalam *the capacity to fight a war* juga termasuk sesuatu yang harus diterjemahkan dari aspirasi politik negara tersebut. Naskah ini mencoba menggambarkan proses berpikir demikian dalam konteks pembangunan postur kekuatan Angkatan Laut sekarang.

2. Kekuatan Militer sebagai Cerminan Aspirasi Politik Negara

Clausewitz (1780-1831) mengatakan bahwa perang adalah kepanjangan tangan dari politik. Perang adalah suatu proses penggunaan kekuatan agar pihak lawan mengikuti kehendak kita. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa suatu postur kekuatan yang dibangun adalah

cerminan aspirasi politik dari suatu negara.

Bila pada suatu kurun waktu aspirasi politik dari negara tertentu bernuansa ekspansif ataupun ingin menjadi *superpower* lokal maupun internasional, maka postur kekuatan militer yang dibangun akan mudah terlihat secara signifikan. Demikian juga terjadi pada hal yang sebaliknya, postur kekuatan militer yang dibangun tidak signifikan bila aspirasi politik negara tersebut tidak ingin ekspansif atau menjadi *superpower* lokal atau internasional.

Tidaklah mengherankan bila kekuatan militer Amerika hadir di setiap pelosok dunia karena hal tersebut konsisten dengan aspirasi politiknya, yang tercermin dari misi politik luar negerinya yang mengatakan *to create a more secure, democratic, and prosperous world for the benefit of the American people and the international community*.² Pernyataan *to create a more secureworld* itulah yang menghadirkan, misalnya untuk kekuatan laut, *U.S. Seventh Fleet* di kawasan Asia Pasifik, *The U.S. Fleet Forces Command* yang dulunya bernama *U.S. Atlantic Fleet* di kawasan Atlantik, *U.S. Sixth Fleet* di kawasan Mediterania, *U.S. Fifth Fleet* di kawasan Teluk Persia dan lain-lain.

Atau bentuk kerjasama kekuatan militer dengan negara-negara setempat, misalnya mulai dari NATO di Eropa, *Five Power Defence Arrangement* di Asia Tenggara dan lainnya, sampai dengan pembangunan sistem anti rudal balistik di Ceko yang dianggap kontroversial itu. Sedangkan *the capacity to fight a war* yang dimaksudkan dalam definisi postur militer adalah kemampuan untuk berperang yang dianggap perlu untuk membela kepentingan Amerika di seluruh dunia (*for benefit of the American people*). Inilah kemampuan yang dituntut dari kekuatan militer Amerika di seluruh dunia.

3. Aspirasi Politik di Indonesia

Bagaimana dengan aspirasi politik negara Indonesia yang dihubungkan dengan kebutuhan kekuatan militer yang diperlukan? Bila diperhatikan secara jeli, maka untuk melindungi eksistensi Indonesia saja pun negara masih mengharapkan budi baik dari masyarakat internasional. Hal ini tercermin dari misi pertama dari Departemen Luar Negeri yang menyebutkan *Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia*.³

Artinya aspirasi politik negara memang tidak atau belum mengantisipasi akan perlunya pembangunan suatu kekuatan militer yang cukup kuat untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Dapat dipastikan bahwa rancangan pernyataan dalam misi ini bukanlah tanpa alasan sama sekali. Mungkin, budaya bangsa Indonesia yang cinta damai serta adanya harapan hubungan yang harmonis sesama negara merupakan landasan yang digunakan oleh kaum politisi sehingga terciptalah pernyataan misi seperti itu.

Atau mungkin juga pernyataan misi tersebut sangat temporer sifatnya, mengingat masa keterpurukan dalam berbagai bidang masih belum selesai juga. Bila kondisi sudah berubah menjadi ke arah yang jauh lebih baik, maka mungkin saja pernyataan misi tersebut akan mengalami revisi.

Departemen Pertahanan melakukan langkah pragmatis untuk tetap konsisten dengan aspirasi politik negara tersebut, dengan memperkenalkan prinsip membangun postur kekuatan militer yang memenuhi Kekuatan Pokok Minimal (*minimum essential force*) yang merupakan jawaban atas keterbatasan dana.⁴ Baik dari aspirasi politik maupun prinsip ini, keduanya tidak mudah untuk menafsirkan *the capacity to fight a war* yang bagaimanakah yang diinginkan oleh negara.

Misalnya, tuntutan atas *the capacity to fight a war for the country's survival* sekalipun, sepertinya tidak dapat dibaca sama sekali. Namun dapat dipastikan bahwa kedua batasan tersebut cukup berguna untuk dijadikan koridor oleh para perancang kekuatan dalam menggingir ambisi kematraannya untuk tetap dalam format yang realistis. Agar kekuatan yang dibangun dapat lebih efektif, maka masih diperlukan

pemikiran atas *the capacity to fight a war* seperti apakah yang pantas untuk diadopsi. Hal ini sangat tergantung dari persepsi setiap angkatan atas prioritas tugas pokok yang harus diembannya.

4. Fokus Kemampuan Kekuatan Angkatan Laut

Secara esensial, sebagai salah satu unsur pertahanan, postur kekuatan Angkatan Laut sejatinya digunakan untuk melakukan *to seek and destroy* setiap kekuatan di laut yang mencoba merongrong keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Namun, fakta geografis negara yang berbentuk kepulauan di mana sekitar 70 persen merupakan wilayah perairan, secara alamiah Angkatan Laut menjadi institusi satu-satunya yang bertindak sebagai ujung tombak negara untuk tugas pengamanan yang bersifat konstabulari di laut.

Maka, di samping pengamanan atas tindakan terorisme, penyelundupan dan lainnya, kiranya pengamanan atas kekayaan negara di dan lewat laut, terutama dalam situasi negara yang masih terpuruk sekarang ini, tidak kurang esensialnya dibandingkan dengan tugas *to seek and destroy* musuh seperti halnya tugas sebagai unsur pertahanan di laut. Bahkan semakin hari mungkin menjadi semakin menonjol tuntutannya.

Paradigma lama secara implisit selalu menggunakan *outward looking capacity* sebagai pijakan utama dalam pembangunan kekuatan di laut. Dengan pertimbangan batasan pembangunan Kekuatan Pokok Minimal serta aspirasi politik bahwa masih adanya ketergantungan negara akan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia, maka mungkin perlu adanya paradigma baru dalam membangun

kekuatan Angkatan Laut.

Paradigma baru itu adalah bahwa dalam situasi batasan Departemen Pertahanan serta aspirasi politik yang masih seperti itu, maka fokus pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut cenderung lebih diarahkan untuk tujuan kekuatan pengamanan laut, terutama pengamanan kekayaan negara di dan lewat laut. Hal itu sangatlah penting untuk menjawab *the capacity to fight a war* seperti apakah yang akan dibangun dalam format yang realistis.

Selanjutnya, bila batasan Departemen Pertahanan serta aspirasi politik telah berubah ke arah yang lebih kondusif, maka fokus pembangunan kekuatan laut ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi. Yaitu pembangunan *outward looking capacity* yang mampu untuk melakukan *to seek and destroy* musuh di laut. Karena, bila sekarang ini dipaksakan untuk membangun kedua macam fokus kemampuan tersebut sekaligus, maka kemungkinan besar kedua-duanya tidak dapat tercapai.

Berbagai realitas menunjukkan bahwa tugas pengamanan kekayaan negara di dan lewat laut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Walaupun merupakan ironi, misalnya adalah suatu kenyataan bahwa TNI Angkatan Laut cukup kedodoran dalam pengamanan atas pencurian ikan ataupun *illegal logging*. Padahal, Angkatan Laut tidak melakukan tindakan *to seek and destroy* tetapi hanya melakukan *to seek and process* atas suatu "kekuatan laut" yang tidak dilengkapi dengan persenjataan. *To process* maksudnya adalah menangkap atau melepaskan, yang dalam situasi bagaimanapun sasaran itu tidak punya kemampuan untuk melawan dengan persenjataan.

Masalah utama terletak pada kemampuan *to seek* yang merupakan rangkaian proses mulai dari me-

ngumpulkan data dari sumber mana saja sampai menemukan posisi sasaran di laut. Rangkaian proses tersebut membutuhkan, misalnya, unit-unit in-telejen, pos-pos pengamat, berbagai peralatan penyadap komunikasi, radar-radar yang terpasang di kapal maupun di darat, pesawat-pesawat patroli/pengintai di laut, kapal patroli itu sendiri serta seluruh dukungan aspek logistiknya.

Bila kembali pada batasan *minimum essential force* serta aspirasi politik negara seperti yang telah disebutkan terdahulu, maka pembangunan kekuatan seyogianya dimulai dengan membangun kemampuan *to seek* sebagai titik awal pembangunan

kekuatan laut. *The capacity to fight a war* yang diinginkan pun menjadi jelas yaitu kemampuan untuk "memerangi" penjarah kekayaan negara di dan lewat laut. Kemampuan *to seek and process* ini selanjutnya, bila dipraktekkan secara terus-menerus akan sangat berguna bila pada saatnya kelak Angkatan Laut sudah memasuki tahap membangun tahapan kemampuan *to seek and destroy* musuh di laut.

5. Penutup

Realitas aspirasi politik bahwa masih adanya ketergantungan negara akan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia serta batasan pembangunan

Kekuatan Pokok Minimal, menuntut akan adanya fokus akan prioritas pembangunan di setiap angkatan. Pemilihan prioritas ini sangat tergantung dari cara setiap angkatan dalam mendefinisikan prioritas masalah yang terkait dengan tugas pokok dan selanjutnya menemukan solusinya secara optimal. Seoptimal apapun solusi yang diperoleh akan selalu ada *trade off* yaitu adanya sesuatu yang harus dikorbankan. Pengorbanan tersebut dapat mulai dari fleksibilitas interpretasi atas tugas pokok sampai dengan rasa kebanggaan atas angkatan yang dicintai.

1. www.dictionary.reference.com
2. U.S. Department of State, Foreign Policy Agenda, November 2007
3. <http://www.deplu.go.id/>
4. Menhan RI, 2005

Tentang Penulis:

Budiman Djoko Said adalah Laksda TNI (Purn), alumni AAL-XV, mantan Komandan Seskoal (2000-2001). Kini menjabat Wakil Ketua FKPM dan Rektor UPN Veteran, Jakarta.

Umar Abubakar adalah Kolonel Laut (Purn), alumni AAL-XIV, meraih gelar insinyur di STTAL Surabaya dan S-2 di ITB Bandung, alumni Seskoal Dikreg XXIV dan pemegang MSc dari *U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, California* pada bidang *Management Science*. Terakhir bertugas di Dinas Pendidikan TNI-AL

Alman Helvas Ali adalah analis di FKPM. Aktif menulis di beberapa majalah dan surat kabar dengan spesialisasi isu kekuatan laut dan keamanan maritim.